



P-ISSN: 2622-5336

**ECO-BUILD JOURNAL**

Economy Bring Ultimate Information All About Development Journal  
STIE MUHAMMADIYAH TANJUNG REDEB



E-ISSN: 2620-5416

## **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN BERAU**

**Dhian dwi ratnasari**

Jurusan Studi Pembangunan

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Tanjung Redeb

### **Abstract:**

*Tax has a very important role in the life of the state, especially in continuing development, because taxation is one source of state revenue to finance state expenditure. Financing the implementation of government, development and society in the area of Berau Regency needs to be created with maximum efforts to extract sources of revenue and potential utilization owned by the region, one of which is through the Land and Building Tax (PBB). Strategies to increase regional revenue, including the need to know the factors that influence the PBB revenue.*

*This study aims to analyze what factors influence the receipt of land and building tax (PBB) in Berau Regency. The data used in this study are time series data with an observation period of 2014-2018. The analytical tool used is: Multiple Regression Analysis, Correlation Analysis, t Test and F Test.*

*The results of this study indicate that the influence of individual and simultaneous significance of independent variables consisting of: Number of Taxpayers, Building Area, and Land Area has a significant effect on PBB Revenue in Berau Regency. So the hypothesis which states that the alleged number of taxpayers, building area, and land area has a significant effect on the receipt of land and building tax (PBB) in Berau Regency can be accepted.*

*The basis for calculating the amount of PBB owed is the sale value of the tax object (NJOP) on the relevant tax object, there is often an imbalance in the amount of PBB that must be paid due to the location of the tax object and the amount / extent of the tax object concerned, it is recommended to the relevant agencies in terms of This Regional Government of Berau Regency through the Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berau is able to formulate an NJOP assessment system that better reflects the sense of community justice and meets the principle of accountability (besides being accountable), in addition it is necessary to update tax object data owned by taxpayers regularly, so that can be seen the current tax object conditions so that the NJOP can be adjusted.*

*Keywords: number of taxpayers, building area, land area, and land and building tax revenue.*



P-ISSN: 2622-5336



E-ISSN: 2620-5416

**Abstrak**

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam melanjutkan pembangunan, karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran negara. Pembiayaan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah Kabupaten Berau perlu diciptakan berbagai upaya yang maksimal terhadap penggalian sumber-sumber penerimaan pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh daerah, salah satunya adalah melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Strategi untuk meningkatkan penerimaan daerah tersebut, diantaranya perlu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PBB tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang memengaruhi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Berau. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data runtun waktu (*time series*) dengan periode pengamatan tahun 2014-2018. Alat analisis yang digunakan yaitu: Analisis Regresi Berganda, Analisis Korelasi, Uji t dan Uji F.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh signifikansi secara individual dan secara simultan, variabel bebas yang terdiri dari: Jumlah Wajib Pajak, Luas Bangunan, dan Luas Lahan mempunyai pengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Berau. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa diduga Jumlah Wajib Pajak, Luas Bangunan, dan Luas Lahan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Berau dapat diterima.

Dasar perhitungan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terhutang adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada objek pajak yang bersangkutan dimana seringkali terjadi ketimpangan besarnya PBB yang harus dibayar dikarenakan lokasi objek pajak dan besaran/luasnya objek pajak bersangkutan, maka disarankan pada instansi terkait dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Berau melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berau untuk dapat merumuskan suatu sistem penilaian NJOP yang lebih mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan memenuhi prinsip akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan), selain itu perlu adanya update data objek pajak yang dimiliki oleh wajib pajak secara rutin, agar dapat diketahui kondisi objek pajak terkini sehingga dapat disesuaikan NJOP-nya.

**Kata Kunci: jumlah wajib pajak, luas bangunan, luas lahan, dan penerimaan pajak bumi dan bangunan.**

**1. PENDAHULUAN**

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam melanjutkan pembangunan, karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran negara. Selain itu, pajak juga digunakan untuk memenuhi

kebutuhan nasional, baik berupa barang ataupun jasa. Salah satu pajak dalam negeri adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1986 berdasarkan UU No.12 tahun 1985. PBB terakhir diatur dalam UU Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.



P-ISSN: 2622-5336



E-ISSN: 2620-5416

Pajak Bumi dan Bangunan adalah penerimaan pusat yang sebagian besar hasilnya diserahkan kepada daerah, karena PBB termasuk jenis pajak yang penerimaannya dibagi-bagikan kepada daerah sebagai hasil dana perimbangan (*Revenue Sharing*) (Resmi, 2011:229). PBB ini merupakan pajak obyektif atau kebendaan, yang dibayar oleh pendapatan wajib pajak dimana tingkat kemampuan wajib pajak akan mempengaruhi tingkat keberhasilan penerimaan pajak.

Berkenaan dengan PBB, meskipun memiliki nilai penerimaan yang relatif kecil dibandingkan dengan pajak pusat lainnya tetapi mempunyai dampak yang cukup luas, sebab hasil penerimaan PBB dikembalikan untuk pembangunan daerah yang bersangkutan. Disamping itu, PBB juga mempunyai wajib pajak yang terbesar dibandingkan pajak-pajak lainnya. Penerimaan PBB dari tahun ke tahun terus meningkat disamping itu PBB merupakan satu-satunya pajak properti di Indonesia.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penerimaan PBB dimasukkan dalam kelompok penerimaan bagi hasil pajak. Sedangkan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian pemerintah pusat memang dibagikan kepada seluruh kabupaten atau kota dengan alokasi sebesar 65% dan 35% dibagikan sebagai insentif kepada daerah.

Kabupaten Berau adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Program strategis pembangunan Kabupaten Berau mencakup semua kegiatan pembangunan daerah dan sektoral yang dikelola oleh pemerintah bersama masyarakat. Pembiayaan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah Kabupaten Berau perlu diciptakan berbagai upaya yang maksimal terhadap penggalan sumber-sumber penerimaan dan pemanfaatan

potensi yang dimiliki oleh daerah, salah satunya adalah melalui PBB. Strategi untuk meningkatkan penerimaan daerah tersebut, diantaranya perlu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PBB tersebut.

Kabupaten Berau yang sedang berkembang dimana sebagian pendapatan daerah bertumpu pada sumber daya alam, memerlukan pertumbuhan ekonomi yang baik dalam melaksanakan proses pembangunan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi baik maka juga akan meningkatkan tingkat pembangunan di Kabupaten Berau hal ini dapat dilihat pada meningkatnya jumlah luas objek bumi dan bangunan dan juga meningkatnya daftar wajib pajak setiap tahun. Dengan demikian ada keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pembangunan hal ini juga perlu di dukung oleh kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan.

Dengan tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi dalam membayar PBB maka juga dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah juga akan dapat dirasakan oleh masyarakat dengan adanya pembangunan fasilitas publik memadai.

Meningkatnya jumlah wajib pajak dianggap sebagai faktor positif dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan. Jumlah wajib pajak yang besar berarti akan menambah jumlah penerimaan pajak. Namun demikian, patut dipertanyakan apakah meningkatnya jumlah wajib pajak akan memberikan faktor positif atau negatif terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan. Sebenarnya, hal tersebut tergantung pada tingkat pemahaman dan juga kepedulian wajib pajak akan pentingnya dana yang diperoleh dari hasil penerimaan pajak tersebut.



P-ISSN: 2622-5336



E-ISSN: 2620-5416

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Berau”.

## 2. METODE PENELITIAN

### a. Definisi Operasional

1. Jumlah Wajib Pajak (X1) adalah orang atau badan yang sesuai dengan peraturanperundang-undangan di tentukan sebagai wajib pajak, dilihat berdasarkan satuan orang periode 2014-2018 di Kabupaten Berau.
2. Luas Bangunan (X2) merupakan Bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/ perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha, dan tempat yang diusahakan.
3. Luas Lahan (X3) Sebagaimana tercantum dalam pasal 1 UU Pajak Bumi dan Bangunan, yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi, (perairan) dan tubuh bumi yang berada di bawahnya.
4. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Y) yang menurut penulis merupakan pajak yang di kenakan terhadap objek pajak berupa bumi dan/ atau bangunan yang penerimaannya di hitung dalam satuan rupiah dalam periode 2014-2018 di Kabupaten Berau.

### b. Sampel Data

Sampel data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data runtun waktu (*time series*) dengan periode pengamatan antara tahun 2014 sampai tahun 2018.

### c. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini berupa data sekunder baik yang belum diolah maupun telah diolah, baik dalam

bentukangkaatau uraian. Data-data sekunder yang diperlukan antara lain literature yang relevan dengan judul penelitian seperti buku-buku, jurnal, artikel, makalah dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang secara langsung diperoleh dari penelitian. Pada penelitian ini data diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kabupaten Berau, dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Berau.

### d. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi: Studi Pustaka (*Library Research*) dan Penelitian Lapangan (*Field Research*).

### e. Alat Analisis

Analisis data dilakukan terhadap data penelitian yang meliputi: analisis regresi berganda, analisis korelasi, uji t dan uji F.

## 3. DATA HASIL PENELITIAN

Tabel 1. Wajib Pajak dan Objek Pajak PPB-P2

Tahun	Wajib Pajak	Objek Pajak	Perkembangan Wajib Pajak (%)
2014	2.146	47.523	-
2015	1.713	48.358	-20,2
2016	2.793	50.184	63,0
2017	3.124	48.096	11,9
2018	4.426	53.596	41,7

Tabel 2. Luas Bangunan objek PBB-P2

Tahun	Jumlah (m <sup>2</sup> )	Perkembangan (%)
2014	2.392.087	-
2015	1.057.818	-55,8
2016	2.105.385	99,0
2017	2.145.958	1,9
2018	2.288.259	6,6

Tabel 3. Luas Lahan objek PBB-P2

Tahun	Jumlah (m <sup>2</sup> )	Perkembangan (%)
2014	2.392.087	-
2015	1.057.818	-55,8
2016	2.105.385	99,0
2017	2.145.958	1,9
2018	2.288.259	6,6



Tahun	Jumlah (m <sup>2</sup> )	Perkembangan (%)
2014	213.745.854	-
2015	181.208.811	-15,2
2016	231.006.480	27,5
2017	214.601.714	-7,1
2018	258.144.602	20,3

Tabel4. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Tahun	Jumlah (Rp)	Perkembangan (%)
2014	2.362.566.267	-
2015	1.677.439.503	-29,0
2016	2.189.636.771	30,5
2017	2.467.425.857	12,7
2018	2.390.132.832	-3,1

#### 4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

##### a. Analisis Regresi Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (Jumlah Wajib Pajak, Luas Bangunan, dan Luas Lahan) terhadap variabel terikat (Penerimaan PBB).

Tabel 5. Output SPSS: Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	29,366	,692		42,426	,015
	Wajib Pajak	,287	,013	,665	22,226	,029
	Luas Bangunan	,515	,009	1,109	55,292	,012
	Luas Lahan	-,915	,044	-,747	-20,617	,031

a. Dependent Variable: Penerimaan PBB

Berdasarkan tabel di atas, hasil pengujian regresi berganda menunjukkan nilai koefisien regresi masing-masing variabel, yang selanjutnya dibuat persamaan regresi linier berganda, sebagai berikut:

$$Y = 29,366 + 0,287X_1 + 0,515X_2 - 0,915X_3$$

Dari persamaan regresi di atas dapat diketahui bahwa:

1. Nilai konstanta adalah 29,366 dan bertanda positif.
2. Koefisien regresi Jumlah Wajib Pajak bertanda positif sebesar 0,287.
3. Koefisien regresi Luas Bangunan bertanda positif sebesar 0,515.
4. Koefisien regresi Luas Lahan bertanda negatif sebesar 0,915.

Hasil pengujian regresi berganda di atas menunjukkan bahwa variabel Luas Lahan (X<sub>3</sub>) merupakan variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap Penerimaan PBB karena koefisien regresinya paling besar dibandingkan variabel yang lain yaitu sebesar 0,915.

##### b. Analisis Korelasi

Tabel 6. Output SPSS: Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	1,000 <sup>a</sup>	1,000	,999	,004

a. Predictors: (Constant), Luas Lahan, Wajib Pajak, Luas Bangunan

Tabel di atas menunjukkan nilai R = 1,000, hal ini menggambarkan variabel Jumlah Wajib Pajak, Luas Bangunan, dan Luas Lahan mempunyai tingkat keeratan hubungan yang sangat tinggi terhadap variabel Penerimaan PBB. Interpretasi akan nilai koefisien korelasi ini termasuk dalam kategori korelasi yang tinggi (0,81-1,00) sebagaimana interpretasi korelasi menurut Suharyadi dan Purwanto (2009:162).

Nilai koefisien determinasi (R Square) sebagaimana disajikan pada tabel di atas, yaitu 1,000 atau 100%. Hal ini menggambarkan bahwa variabel Jumlah Wajib Pajak, Luas Bangunan, dan Luas Lahan mampu menerangkan Penerimaan PBB sebesar 100%. Nilai koefisien determinasi sebesar 1,000 ini termasuk dalam kategori baik atau kuat (nilai R Square > 0,5) menurut kriteria yang diberikan oleh Lind dalam Suharyadi dan Purwanto (2009:217).

##### c. Uji t

Uji t statistik merupakan pengujian pengaruh variabel Jumlah Wajib Pajak, Luas Bangunan, dan Luas Lahan secara individual terhadap variabel Penerimaan PBB, untuk membuktikan bahwa masing-



masing variabel ini secara statistik berpengaruh signifikan.

Tabel 7. Output SPSS: Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	29,366	,692		42,426	,015
Wajib Pajak	,287	,013	,665	22,226	,029
Luas Bangunan	,515	,009	1,109	55,292	,012
Luas Lahan	-,915	,044	-,747	-20,617	,031

a. Dependent Variable: Penerimaan PBB

1. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan PBB.

Nilai t-hitung = 22,226 dan nilai t-tabel = 12,706, maka dapat ditentukan bahwa: t-hitung > t-tabel atau 22,226 > 12,706. Maka Ho diterima, artinya variabel Jumlah Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Berau.

2. Pengaruh Luas Bangunan terhadap Penerimaan PBB.

Nilai t-hitung = 55,292 dan nilai t-tabel = 12,706. Maka dapat ditentukan bahwa: t-hitung > t-tabel atau 55,292 > 12,706. Maka Ho dapat diterima, artinya variabel Luas Bangunan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Berau.

3. Pengaruh Luas Lahan terhadap Penerimaan PBB.

Nilai t-hitung = -20,617 dan nilai t-tabel = 12,706. Maka dapat ditentukan: -t-tabel ≥ t-hitung atau -12,706 ≥ -20,617. Maka Ho diterima, artinya variabel Luas Lahan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Berau.

**d. Uji F**

Uji F bertujuan menguji pengaruh variabel Jumlah Wajib Pajak, Luas Bangunan, dan Luas Lahan secara

serentak/simultan terhadap variabel Penerimaan PBB.

Tabel 8. Output SPSS: Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	,099	3	,033	2238,433	,016 <sup>a</sup>
Residual	,000	1	,000		
Total	,099	4			

a. Dependent Variable: Penerimaan PBB  
b. Predictors: (Constant), Luas Lahan, Wajib Pajak, Luas Bangunan

Dari tabel di atas dapat ditentukan bahwa nilai F-hitung > F-tabel atau 2.238,433 > 216. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Jumlah Wajib Pajak, Luas Bangunan, dan Luas Lahan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Berau.

Berdasarkan hasil uji pengaruh signifikansi masing-masing variabel bebas, menunjukkan bahwa ketiga variabel yaitu: Jumlah Wajib Pajak, Luas Bangunan, dan Luas Lahan mempunyai pengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Berau. Demikian pula hasil uji pengaruh signifikansi variabel bebas secara bersama-sama/serentak menunjukkan bahwa ketiga variabel yaitu: Jumlah Wajib Pajak, Luas Bangunan, dan Luas Lahan mempunyai pengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Berau.

**5. PENUTUP**

**a. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil uji pengaruh signifikansi secara individual dan secara simultan, variabel bebas yang terdiri dari: Jumlah Wajib Pajak, Luas Bangunan, dan Luas Lahan mempunyai pengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Berau. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa diduga Jumlah Wajib Pajak, Luas Bangunan, dan Luas Lahan



P-ISSN: 2622-5336



E-ISSN: 2620-5416

berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Berau dapat diterima.

**b. Saran**

Saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, yaitu: mengenai dasar perhitungan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terhutang adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada objek pajak yang bersangkutan dimana seringkali terjadi ketimpangan besarnya PBB yang harus dibayar dikarenakan lokasi objek pajak dan besaran/luasnya objek pajak bersangkutan, maka disarankan pada instansi terkait dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Berau melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berau untuk dapat merumuskan suatu sistem penilaian NJOP yang lebih mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan memenuhi prinsip akuntabilitas(dapat dipertanggungjawabkan), selain itu perlu adanya update data objek pajak yang dimiliki oleh wajib pajak secara rutin, agar dapat diketahui kondisi objek pajak terkini sehingga dapat disesuaikan NJOP-nya.

**6. DAFTAR PUSTAKA**

Al-Qura'an terjemahan, Kementrian Agama RI

Badan Pusat Statistik. 2019 Kabupaten Berau - Kalimantan Timur

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berau. 2019 Kabupaten Berau

Hasan. Iqbal M. 2002. *Pokok-pokok Materi Statistika Dua*. Edisi Kedua. PT bumi Aksara. Jakarta

Hadi Sasana,2005 “Objek penelitian Pajak bumi dan Bangunan (PBB) di kabupaten Banyumas” Jawa Tengah

Ilham Koentarto,2011 “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan pada Kecamatan Arut Selatan”Kabupaten Kotawaringin Barat.

Makmur,2010 “ faktor- faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kutai Barat.” Kalimantan Timur

Muda Markus. 2005. *Perpajakan Indonesia Suatu Pengantar*. Gramedia Pustaka Utama Jakarta

Nachrowi, dan Usman. 2006. *Pendekatan Populer dan Praktis EKONOMETRIKA Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta

Resmi,Siti.2005. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi ke empat. Salemba Empat. Jakarta

\_\_\_\_\_.2011. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi ke enam. Salemba Empat. Jakarta.

Setiawan & Basri Musri. 2006 *perpajakan umum*, Edisi 1, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Sukirno, Sadono. 2006. *Pengantar Ekonomi Makro. Edisi-3*. PT.Raja grafindo Persada. Jakarta

Suharyadi, Purwanto 2009. *Pengaruh pembiayaan mudharaba terhadap pembiayaan*



P-ISSN: 2622-5336

9 772622 533006



E-ISSN: 2620-5416

9 772622 541006

## ECO-BUILD JOURNAL

Economy Bring Ultimate Information All About Development Journal  
STIE MUHAMMADIYAH TANJUNG REDEB

- Setiawan & Basri Musri. 2006  
*perpajakan umum*, Edisi 1, PT.  
Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Suprianto Edy. 2011. *Perpajakan di  
Indonesia*, Edisi 1, GRAHA  
ILMU.Yogyakarta.
- Suharyadi dan Purwanto. 2004.  
*Statistika untuk Ekonomi dan  
Keuangan Modern*. Salemba  
Empat. Jakarta
- Usman,Husaini & Akbar, Setiadi P.  
2006. *Pengantar satistika*. Edisi  
Kedua.PT.BumiAksara.Yogyakarta
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994  
Tentang Perubahan Atas Undang-  
undang Nomor 12 tahun 1985  
Tentang Pajak Bumi dan  
Bangunan
- Waluyo.2007. *Perpajakan Indonesia*.  
Edisi ke enam.Salemba Empat.  
Jakarta.
- \_\_\_\_\_.2008. *Perpajakan Indonesia*.  
Edisi ke delapan.Salemba Empat.  
Jakarta.
- Mintarsih, 2003.*Faktor-faktor yang  
berpengaruh terhadap penerimaan  
pajak bumi dan bangunan (PBB) di  
Propinsi Daerah Tk.I Jawa  
Tengah*.Tesis.Universitas  
Diponogero. Semarang